

JURNAL AKADEMIKA

Jurnal Hasil Penelitian

<https://www.ejournal.lppmunidayan.ac.id/index.php/akd>

e-ISSN : 2548-4184

P-ISSN : 1693-9913

Keywords: *Inhibiting Factors, Development, Drainage.*

Kata kunci: Faktor Penghambat, Pembangunan, Drainase.

Korespondensi Penulis:

Email: nurhayatisulaiman66@gmail.com



PENERBIT

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau.

Alamat: Jl. Dayanu Ikhsanuddin No. 124 Baubau

FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DRAINASE KOTA BAUBAU

Nurhayati¹⁾

¹⁾ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia.

Dikirim: 18/08/2021;

Direvisi: 10/09/2021;

Disetujui: 29/09/2021.

Abstract

Research Title "Factors That Inhibit the Role of the Public Works Department in Accelerating the Development of Baubau City Drainage". This study aims to describe the factors that hinder the role of the Public Works Department in accelerating the drainage development of Baubau City. This study uses a qualitative descriptive method by conducting field observations, interviews with informants and collecting data from primary and secondary data. The results of this study indicate that the factors that hinder the Department of Public Works in accelerating the development of drainage in Baubau City are internal factors that play a role as a public servant, namely that the Department of Public Works has not been maximally able to provide fast services in accelerating development, such as the slow progress of drainage channels. The role as a communication tool is that there is no proper external coordination mechanism to be used by the Public Works Agency in carrying out the current coordinating task. In addition to improper coordination, the high level of activity in each implementing SKPD, and limited resources in each SKPD often make coordination difficult at the implementation level of drainage development.

Intisari

Judul Penelitian "Faktor-Faktor Yang Menghambat Peran Dinas Pekerjaan Umum Dalam Percepatan Pembangunan Drainase Kota Baubau". Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Faktor-faktor yang menghambat peran Dinas Pekerjaan Umum dalam percepatan pembangunan drainase Kota Baubau. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan observasi lapangan, wawancara kepada informan serta mengumpulkan data yang bersumber pada data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang

menghambat peran Dinas Pekerjaan Umum dalam percepatan pembangunan drainase Kota Baubau yaitu faktor internal yang menjadi Peran sebagai pelayan publik yaitu dinas PU belum maksimal dapat memberikan pelayanan cepat dalam percepatan pembangunan drainase seperti lambatnya penyelesaian pengerjaan saluran drainase. Peran sebagai alat komunikasi yaitu belum adanya mekanisme koordinasi eksternal yang tepat untuk digunakan oleh Dinas PU dalam menjalankan tugas pengkoordinasian yang diemban saat ini.

1. PENDAHULUAN

Drainase merupakan pengaturan pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat pembuangan ini dapat dilakukan dengan mengalirkan menguras membuang atau mengalihkan air melalui alur jalan gorong [1].

Percepatan pembangunan aturan air pada gorong di Kota Baubau yang belum optimal kemungkinan diduga oleh peran Dinas Pekerjaan Umum yang belum optimal pula seperti kurangnya pengawasan pegawai dinas secara detil sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan proyek, perencanaan pembangunan drainase yang belum disusun secara komprehensif sehingga mengakibatkan pelaksanaan pembangunannya kurang memperhatikan kesehatan dan keselamatan masyarakat pengguna jalan apalagi sudah memasuki musim hujan [2]. Kurangnya pengarahan dari pegawai Dinas PU kepada pihak kontraktor sehingga masih adanya penundaan penyelesaian proyek yang seharusnya sudah selesai bulan Desember 2014 tetapi karena kendala teknis sehingga selesai pada tahun 2015. Kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh pegawai Dinas PU dengan dinas lainnya disebabkan tingkat kesibukan yang tinggi pada masing-masing SKPD pelaksana. Peran sebagai pelayan publik yaitu dinas PU belum maksimal dapat memberikan pelayanan cepat dalam percepatan pembangunan drainase seperti lambatnya penyelesaian pengerjaan saluran drainase [3]. Adapun masalah penelitian ini yaitu apakah yang menjadi penghambat peran Dinas Pekerjaan Umum dalam percepatan pembangunan drainase Kota Baubau?.

Seperti yang dikemukakan pada Ref. [4] yang menjadi faktor penghambat dalam penyelenggaraan pelayanan public yaitu: kurang kompetennya sumber daya aparatur, tumpang tindihnya peraturan, sistem pengawasan yang lemah, lemahnya penegakkan aturan dan masyarakat yang bersikap toleran terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang

menyimpang. Sedangkan faktor pendukung dalam penyelenggaraan pelayanan publik yaitu profesionalisme sumber daya aparatur, kelembagaan pemerintah yang tepat, aturan (sistem) yang jelas, pengawasan dan akuntabilitas melalui sistem *reward* dan *punishment*, dan lingkungan pemerintahan yang sehat.

Kesadaran akan lingkungan perlu ditingkatkan pada kalangan masyarakat maupun pihak-pihak lain, tidak lain untuk meningkatkan kesadaran pengetahuan pemahaman akan fungsi dan faedah atau pentingnya sebuah drainase, jika kita diperhadapkan dengan bencana banjir [5]. Musibah ini tentu akan berakibat fatal bagi masyarakat setempat untuk itu peningkatan pengetahuan semua pihak sangat dibutuhkan. Dilain pihak pada instansi terkait juga sangat dibutuhkan pengembangan dan peningkatan pengetahuan dan skill dimasing-masing bidang sesuai tupoksi kerja[6].

Koordinasi antar unit, Kerja sama instansi terkait sangat dibutuhkan demi keselarasan program yang efektif dan tepat sasaran sehingga tidak terjadi tumpang tindih program [7].

Unsur Luar:

- a) Konsumen/pemakai
Ref. [8] "kadang-kadang pengguna jasa menghalalkan segala cara untuk menyelesaikan urusannya meskipun melanggar peraturan, seperti kasus pengurusan izin administrasi apabila data tidak lengkap maka tidak diproses".
- b) Persyaratan administrasi
Pemenuhan persyaratan aturan sesuai hukum sangat dibutuhkan dalam kelancaran administrasi yang merupakan hal utama dalam menunjang hasil yang optimal
- c) Komunikasi antar instansi
Hubungan kerja antar dinas sangat dibutuhkan dalam bentuk komunikasi yang intens sehingga terjadi sinkronitas program yang baik

2. METODE PENELITIAN

Desain riset adalah desain deskriptif kualitatif. Melalui pendekatan kualitatif diperoleh pemahaman penafsiran yang mendalam mengenai makna, kenyataan dan fakta yang relevan. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder adalah: data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Observasi, Wawancara dan Studi dokumentasi [9].

Informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 6 orang terdiri atas Kabid Cipta Karya Dinas PU 1 orang, Kasubag Perencanaan Dinas PU 1 orang, staf 1 orang dan masyarakat 3 orang.

Penentuan informan dilakukan berdasarkan prinsip bertujuan yaitu mencari dan memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan tentang masalah yang diteliti dan mau diwawancarai [10].

3. HASIL PENELITIAN

Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Walikota Bau-Bau Nomor 173 Tahun 2003 dengan tugas pokok adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang pekerjaan umum, permukiman dan prasarana wilayah

Pengelolaan infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar dan daya saing wilayah yang baik dapat berujung pada pencapaian kehidupan masyarakat Kota Baubau yang sejahtera.

Infrastruktur mengandung makna bangunan fisik yang bermanfaat bagi aktifitas dan perkembangan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat Kota Baubau.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau mengembangkan empat agenda utama yaitu:

- 1) Melakukan pembenahan basis data ke-PU-an sebagai instrumen dasar pembangunan infrastruktur daerah;
- 2) Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur kewilayahan melalui peningkatan dan pengembangan jalan dan jembatan serta sumber daya air;
- 3) Menyelenggarakan dan mengembangkan infrastruktur dasar di bidang pengembangan perumahan dan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, penyediaan air bersih, serta sanitasi lingkungan;
- 4) Meningkatkan kualitas SDM serta mengembangkan organisasi dengan prinsip *good governance*.

3.1 Sumberdaya Aparatur Dinas Pekerjaan Umum

Tabel 1.

Kondisi Sumberdaya Aparatur Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Berdasarkan Golongan

URAIAN	Jumlah		Persentase (%)
	Laki-Laki	Perempuan	
Golongan IV	3	-	5,36
Golongan III	23	14	66,07
Golongan II	12	3	26,79
Golongan I	1	-	1,79

I			
JUMLAH	39	17	100,00

Sumber: Kepegawaian Dinas PU Kota Baubau

Tabel 2.

Kondisi Sumberdaya Aparatur Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Berdasarkan Kepangkatan

URAIAN	Jumlah		Persentase (%)
	Laki-Laki	Perempuan	
a. Struktural			
1) Eselon II 1-1.79	1	-	1.79
2) Eselon III	4	-	7.14
3) Eselon IV	7	2	16.07
b. Fungsional			
c. Staf	27	15	75.00
JUMLAH	39	17	100.00

Sumber: Kepegawaian Dinas PU Kota Baubau

Komposisi berdasarkan jabatan sebagaimana ditunjukkan pada tabel di- atas, Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau terdiri dari 1 Orang atau 1.79% dijabat oleh Seorang Kepala Dinas, jabatan Eselon III terdiri dari 4 Orang atau 7.14% yang dijabat oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Eselon IV terdiri dari 9 orang atau 16.07% yang dijabat oleh kepala seksi. Adapun jumlah staf dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau mencapai 42 Orang atau 75.00% yang tersebar diseluruh Bidang. Namun jumlah staf ada menunjukkan masih perlu adanya penambahan jumlah staf dikarenakan besarnya beban kerja di setiap bidang dibandingkan dengan jumlah staf yang ada.

Tabel 3.

Kondisi Sumberdaya Aparatur Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah		Persentase (%)
	Putra	Putri	
S3	-	-	-
S2	6	-	10.71
S1	18	12	53.57
Sarmud/D3	2	5	17.86
D1	-	-	-
SLTA	11	-	19.64
SLTP	2	-	3.57
JUMLAH	36	18	100.00

Sumber: Kepegawaian Dinas PU Kota Baubau.

3.2 Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum

Fasilitas pendukung utama dapat dirinci sebagai berikut:

a. Gedung Kantor

Gedung kantor terletak di Jalan Dayanu Ikhsanuddin No 1, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau. Luas Bangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau adalah ± 818,25 M², yang merupakan bangunan peninggalan Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau.

b. Fasilitas Pendukung

Untuk memudahkan pelaksanaan proram dinas dilengkapi dengan:

- 1) Meja kursi kerja pimpinan dan karyawan, serta fasilitas pendukung pertemuan atasan dan bawahan
- 2) AC split
- 3) Horden
- 4) Komputer
- 5) Laptop sebanyak 8 unit dalam keadaan baik
- 6) LCD/Infocus
- 7) Sound Sistem
- 8) Scanner
- 9) Jack hammer
- 10) Excavator + Breaker
- 11) Wheel Loader
- 12) Vibrator Roller
- 13) Generator
- 14) Kendaraan roda empat bermotor 3 unit dalam keadaan baik;
- 15) Kendaraan roda dua bermotor 6 unit dalam keadaan baik;
- 16) Kendaraan Truk sebanyak 3 unit.

3.3 Faktor yang Menghambat Peran Dinas Pekerjaan Umum dalam Percepatan Pembangunan Drainase di Kota Baubau

A. Internal

Kemampuan pegawai disini dimaksudkan adalah masalah menyangkut perhatian pegawai Dinas PU terhadap pembangunan drainase salah satunya didasarkan pada perhatian pegawai terhadap kebutuhan masyarakat.

Perhatian pegawai disini terhadap pembangunan drainase juga tergantung dari keseriusan pegawai Dinas PU itu sendiri, perhatian ini juga dapat dikatakan tingkat keseriusan dalam pelaksanaan kerja sangat tergantung dari bidang tugas yang embannya, kesejahteraan yang didapatkan serta sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kerja, yang keseluruhannya adalah menjadi indikator dalam tingkat kemampuan pegawai Dinas PU dalam menjalankan tugasnya, yang akhirnya akan

menjadi suatu tolok ukur dalam tingkat penilaian masyarakat terhadap keseriusan dan perhatian pegawai dalam hal pembangunan drainase.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis kepada pegawai menyatakan bahwa peningkatan pengetahuan, keterampilan, keahlian dalam pembangunan infrastruktur drainase perlu sekali untuk diadakan dengan tujuan untuk membentuk dan mengembangkan sikap terhadap tugasnya yang sesuai dengan persyaratan yang dituntut untuk jabatan. Dalam hal ini, peningkatan pengetahuan merupakan salah satu upaya dalam memberikan pemahaman pegawai dalam pembangunan drainase yang dilaksanakan oleh Dinas PU. Upaya meningkatkan kualitas pegawai guna mewujudkan pegawai negeri sebagai sarana pelayanan publik sesuai dengan apa yang diharapkan, sebagian dapat dilakukan dengan melakukan peningkatan pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan mempunyai peran dalam meningkatkan pembangunan. Peningkatan pengetahuan juga sangat bermanfaat bagi pegawai Dinas PU Kota Baubau dalam mempercepat penyelesaian tugas dan fungsinya dalam bidang pembangunan infrastruktur khususnya pembangunan drainase. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pekerjaan cukup mudah untuk dikerjakan setelah diadakannya peningkatan pengetahuan meski masih menemukan kendala. Hal ini seperti yang diungkapkan informan mengatakan bahwa:

“Memang pada dasarnya peningkatan pengetahuan sangat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan pegawai diharapkan peran dinas dalam pembangunan Kota Baubau dan pelayanan yang baik kepada masyarakat.” (Hasil Wawancara Staf Bidang Citra Karya, Rudick Dwi Putra, ST).

Sama halnya yang diungkapkan oleh salah seorang pegawai mengatakan bahwa:

“Memang, selama ini kami perlu peningkatan pengetahuan itu agar pegawai lebih profesional (tahu akan tugas dan tanggungjawabnya) sebagai pegawai negeri, begitu juga dengan kedisiplinan juga harus ditingkatkan agar kerja di kantor dan pelayanan di masyarakat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggungjawab”.

Hal senada diungkapkan oleh masyarakat yang mengatakan:

“Segala urusan yang menyangkut pembangunan fisik di Kota Baubau, belum dapat dibangun dengan baik mungkin karena pegawai belum cukup memiliki kemampuan dan keahlian dibidangnya. Hal ini dapat menunjukkan pegawai belum

memiliki keahlian dan kemampuan yang profesional dalam melaksanakan tugasnya. (Hasil Wawancara Suhardi warga Kota Baubau).

Hal ini dibenarkan oleh warga masyarakat mengatakan:

“Pembangunan fisik yang dilakukan oleh pegawai Dinas PU belum optimal. Hal ini karena dalam proses pembangunan masih terlalu signifikan kelihatan yang ada masih pembangunan pemerintahan terdahulu.

Berdasarkan pengamatan peneliti selama melakukan penelitian di lapangan terlihat bahwa pengetahuan pegawai Dinas PU dalam menjalankan tugas dan fungsinya masih belum maksimal, seperti pada penempatan pegawai yang belum sesuai dengan keahliannya sehingga harus perlu adaptasi terhadap pekerjaan yang baru dan tentunya membutuhkan pelatihan agar lebih memahami wewenang yang akan dijalankannya.

Salah satu manfaat peningkatan pengetahuan akan meningkatkan cara kerja yang lebih profesional sehingga menghasilkan kinerja yang efektif.

Produktivitas pekerjaan pegawai Dinas PU cukup baik setelah dilakukan upaya peningkatan pengetahuan. Hal ini menunjukkan petugas belum sepenuhnya mendapatkan kesempatan untuk peningkatan pengetahuan dengan merata, sehingga pegawai tersebut mendapatkan produktivitas yang cukup baik dari peningkatan pengetahuan tersebut. Disini masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan, salah satunya adalah peningkatan pengetahuan dalam menyelesaikan pekerjaan. Hasil temuan dilapangan dari jawaban informan, menyatakan bahwa lebih besar pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik setelah dilakukannya upaya peningkatan pengetahuan. Kemungkinan hal ini disebabkan antara lain karena pegawai tersebut belum benar-benar diupayakan untuk mendapatkan kesempatan dalam peningkatan pengetahuan yang diselenggarakan oleh Dinas PU daerah dengan baik dan kurangnya motivasi pegawai sendiri dalam bekerja.

Ketaatan pada koridor aturan menghasilkan suatu tata kerja yang dinamis, tanpa merasa ada tekanan dalam pelaksanaan tugas. Ketaatan dimaksud disini merupakan ketaatan paripurna dari semua segi ketepatan pencapaian tujuan program yang lebih baik, kualifikasi seperti yang diinginkan organisasi. Disiplin merupakan salah satu parameter dalam produktivitas pegawai nampaknya harus disikapi secara sungguh-sungguh dan harus ditegakan. Dengan disiplin kerja pegawai yang baik, ada kecenderungan

terhadap mutu pelayanan yang lebih baik. Menyikapi masalah disiplin dalam kaitannya dengan pegawai Dinas PU tentu dijumpai berbagai persoalan. Untuk mengetahui penerapan disiplin kerja pegawai, subjek pegawai Dinas PU yang mengemukakan:

“Dalam hal disiplin kerja pegawai Dinas PU termasuk belum baik, artinya disiplin ditinjau dari segi waktu maupun sikap dan perilaku pegawai. Dari segi waktu, kehadiran pegawai pada waktu masuk kerja sebagian besar belum tepat pada waktunya. Dari segi perbuatan, pegawai belum menunjukkan sikap dan perilaku yang baik meski telah mendapatkan kesempatan untuk peningkatan pengetahuan. (Hasil Wawancara, Kabid Cipta Karya, Muhammad Ashar, ST., M.Eng

Hal senada dikemukakan pegawai lainnya yang mengatakan:

“Ketaatan pegawai terhadap jam kerja termasuk belum optimal, artinya sebagian besar pegawai belum mengikuti dan menaati peraturan yang ditetapkan, baik menyangkut ketepatan masuk kerja, keberadaan pada saat kerja, waktu pulang kerja, maupun pemakaian atribut yang disediakan oleh lembaga. Hanya sebagian kecil pegawai yang menaati peraturan tersebut. Sudah selayaknya pegawai harus mendapatkan peningkatan pengetahuan agar disiplin pegawai dapat meningkat, karena akan berdampak pada pegawai yang lain. Penegakan disiplin pegawai merupakan barometer untuk memastikan organisasi harus ditanamkan secara sungguh-sungguh tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. (Hasil wawancara Staf Bidang Citra Karya, Rudick Dwi Putra, ST).

Hal yang sama diungkapkan oleh salah seorang pegawai mengatakan:

“Pengetahuan yang dimiliki pegawai dalam melaksanakan tugas pekerjaannya masih terbatas.” (Hasil Wawancara Kasubag Perencanaan Faharuddin, ST).

Berdasarkan pernyataan informan di atas menunjukkan bahwa pelayanan masyarakat Dinas PU melalui peningkatan disiplin kerja belum baik. Disiplin kerja mutlak harus dilaksanakan karena akan membawa konsekuensi pada produktivitas kerja. Disiplin pegawai bagi dari segi waktu, menyangkut kehadiran pegawai pada saat masuk kerja, keberadaan pada jam produktif, maupun pada waktu pulang kerja termasuk cukup baik. Walaupun terdapat sebagian kecil yang mematuhi aturan tersebut, tetapi secara operasional kurang

mematuhi aturan tersebut sehingga mempengaruhi rutinitas secara keseluruhan. Mengenai disiplin dalam bentuk perbuatan yang melahirkan sikap dan perilaku pegawai belum menampakan perilaku yang desktruktif. Penegakan disiplin kerja pegawai telah ditanamkan secara proposional tanpa mengandung perlakuan yang diskriminatif, walaupun produktivitasnya kurang maksimal. Hal tersebut disebabkan masing-masing pegawai memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga kesadaran pegawai terhadap disiplin kerja juga berbeda. Kepala Dinas tidak segan-segan memberikan teguran bahkan sanksi terhadap pegawai yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku.

Skill salah merupakan indikator primer untuk raihan produktivitas berdaya guna pada hasil akhir. Semakin baik kualitas skill aparat, berkonsekwensi dengan hasil yang optimal dalam pencapaian kinerja yang baik.

Kemampuan teknis untuk melakukan sesuatu kegiatan tertentu yang dapat dipelajari dan dikembangkan. Dengan demikian keterampilan berarti penguasaan terhadap berbagai teknik, prosedur serta peraturan yang berhubungan dengan bidang tugas yang dimiliki anggota organisasi. Subjek informan memberi keterangan:

"Keterampilan Pegawai Dinas PU harus ditingkatkan utama dapat memanfaatkan komputer dan laptop dengan baik, karena sekarang kita harus bisa membuat laporan atau rencana kegiatan lainnya sehingga dapat meningkatkan produktivitas pegawai. (Hasil Wawancara, Kabid Cipta Karya, Muhammad Ashar, ST, M.Eng).

Hal senada diungkapkan salah seorang pegawai, yang mengatakan bahwa:

"Pegawai di Dinas PU perlu dibina atau diikutkan dalam bimbingan teknik mengenai penguasaan teknologi, jangan gaptek (gagap teknologi) apalagi semakin hari kita berhadapan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang kian banyak, oleh karena itu cara efisien dalam menjalankan tugas dengan mengasah kemampuan pegawai lewat teknologi yang disediakan oleh kantor" (Hasil Wawancara, Staf Bidang Citra Karya, Rudick Dwi Putra, ST).

Dari hal tersebut dapat diidentifikasi, dalam keterampilan pegawai Dinas PU cukup tinggi hal ini dapat dilihat pada tanggapan informan yang harus selalu mengasah kemampuannya dalam bidang teknologi disamping itu keterampilan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi dapat ditingkatkan untuk menciptakan produktivitas yang baik bagi organisasi dan pemberian pelayanan yang baik pada masyarakat.

B. Eksternal

Saluran drainase dikatakan bermasalah bila hasil kerja tidak efektif pada penanganan air/banjir yang berlebihan di permukaan jalan. Banyak faktor yang menyebabkan konstruksi drainase tidak memenuhi kriteria aman. Pertumbuhan, perkembangan kota memunculkan masalah pada sistem penyerapan air semisal perkembangan beberapa kawasan hunian misalnya Jalan Bataraguru, Jalan Murhum, Jalan Betoambari adalah salah satu ruas jalan di Kota Baubau yang masih sering mengalami genangan karena tidak maksimal kapasitas saluran menampung ataupun mengalirkan, disebabkan karena perkembangan urbanisasi, menyebabkan perubahan tata guna lahan, sedangkan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh tata guna lahan dan bangunan yang kurang teratur. Oleh karena itu dalam perkembangan kebijakan Kota Baubau harus diikuti dengan perbaikan sistem pengaliran jaringan secara simultan harus meliputi daerah sekitarnya juga.

"Menurut saya drainase lama itu memang kurang layak mengalirkan air pada saat musim hujan sehingga sering terjadi genangan air beberapa kelurahan, sehingga bisa mengganggu pengguna jalan dan para pengguna jalan harus memutar balik lagi untuk mencari jalan lain" (hasil wawancara dengan Suhardi warga Kota Baubau).

"Kita harapkan dengan adanya drainase yang baru dibuat ini akan membantu mengurangi banjir yang ada di Kota Baubau, hanya saja perilaku masyarakat membuang sampah di saluran drainase cukup mempengaruhi kerja saluran drainase tersebut untuk mengalirkannya ke sungai sehingga kadang kala sering mengalami penyumbatan pada saat musim hujan" (hasil wawancara dengan La Ode Muin warga Kota Baubau).

Jaringan drainase di Kota Baubau gorongan buatan yang hulunya terletak di kota bermuara di sungai melewati kota Baubau. Analisis hidrologi diperlukan untuk perencanaan drainase maupun jembatan yang melintas sungai atau saluran. Setiap kegiatan yang melibatkan lahan sebagai objek, seperti perumahan, perkantoran, dan industri harus mempertimbangkan aliran air hujan. Pengembangan lahan biasanya diikuti pengikisan daya serap air menimbulkan peningkatan laju dan volume aliran permukaan.

Pada beberapa lokasi pengembangan drainase diperlukan untuk mengontrol kenaikan aliran permukaan dan mengalirkan air ke sungai maupun lautan. Besarnya beban aliran membawa masalah banjir yang meresahkan masyarakat Kota Baubau di sepanjang saluran drainase. Pemanfaatan saluran drainase untuk membuang sampah dan saluran drainase yang tidak bisa mengalirkan air hujan berdampak terjadinya himpitan Batasan tampung saluran drainase itu sendiri. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, untuk itu perencanaan penggalian saluran air yang cukup besar yang berdasarkan pada prinsip partisipatif untuk itu dibutuhkan kerja sama bagi semua masyarakat Bersama pemerintah agar dapat mengantisipasi permasalahan.

“Kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan drainase juga penting, meskipun itu merupakan tugas kami agar bagaimana saluran drainase tersebut membantu dalam mengalirkan air sehingga tidak banjir lagi..” (hasil wawancara dengan Kabid Cipta Karya, Muhammad Ashar, ST, M.Eng).

“Partisipasi masyarakat dalam percepatan pengerjaan drainase memang saya rasa penting, masukan maupun bantuan dari masyarakat untuk melakukan pengawasan sangat penting dalam menguatkan peran dinas untuk mewujudkan pembangunan yang partisipatif..” (hasil wawancara dengan Kasubag Perencanaan Faharuddin, ST).

Untuk mengatur permasalahan infrastruktur tersebut, diperlukan sistem drainase ramah alam, agar lebih dini mengantisipasi permasalahan pada penyerapan sehingga tidak terjadi banjir, peningkatan kesadaran semua masyarakat dan lainnya dibutuhkan konsistensi memadukan berbagai tingkat kepentingan, maka perlu diupayakan adanya koordinasi antara pihak masyarakat.

Peran serta masyarakat dilakukan dengan pendekatan partisipatif dengan melibatkan semua unsur. pembangunan sistem drainase. meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya banjir serta peduli lingkungan. kebijakan publik harus melibatkan masyarakat pada semua bidang supra, infrastruktur sampai dengan pengoperasiannya.

Berdasarkan pengamatan penelitian drainase di Kota Baubau dikatakan belum cukup efektif karena tidak dapat mengeringkan/melimpaskan air secara cepat, akibatnya melahirkan permasalahan lingkungan banjir itu akan menimbulkan kerusakan-kerusakan dan menghambat kegiatan masyarakat. dibarengi perbaikan saluran drainase tentunya perubahan

tata guna lahan ini bisa menjadi penyebab besar banjir.

“Kami kadangkala berkoordinasi dengan dinas terkait misal penyediaan lahan hijau harus berkoordinasi dengan DPRD, dinas pertamanan, dan kebersihan karena dalam upaya mengurangi banjir bukan hanya membangun saluran drainase saja tetapi terbukanya lahan hijau sangat penting untuk lokasi yang susah mengalirkan air ke laut ataupun sungai kurangnya daya serap tanah di lokasi tersebut. Untuk DPRD harus bisa mengalokasikan dalam pembuatan drainase..” (hasil wawancara dengan Staf Bidang Citra Karya, Rudick Dwi Putra, ST).

Berdasarkan pengamatan peneliti selama di lapangan terlihat bahwa alokasi pembangunan drainase cukup besar bahkan hampir setiap jalanan masih dalam upaya perbaikan drainase seperti di kelurahan Tomba, Kelurahan Bataraguru, Kelurahan Tarafu dan perempatan tugu kirab, oleh karena itu pengalokasian anggaran untuk pembangunan drainase pada tahun 2015 lebih besar dibanding dengan pembangunan infrastruktur lainnya.

Penyaluran sedapat mungkin membentuk sistem dimana terdapat hierarki fungsi yang tepat sehingga saluran drainase akan terbagi menjadi sistem tersier, sistem sekunder, sistem primer. Pembagian saluran ini dari pemukiman ke-arah hilir dimensinya akan membesar.

Dalam perancangan drainase di Kota Baubau, diperlukan banyak pertimbangan dan perlu diperhatikan dalam perancangan adalah:

1. Debit rencana, dalam menentukan debit rencana memerlukan kajian yang panjang dan wilayah. Kesalahan menentukan debit yang sangat krusial tidak dapat memperkirakan debit banjir. Kesalahan yang mungkin terjadi:
 - a) Kesalahan penggunaan informasi intensitas hujan.
 - b) Ketidaktahuan peralihan tata guna lokasi awal dan ahir mandegnya aliran perubahan tata guna lahan seperti tempat tinggal Ketika lokasi dipenuhi oleh hunian dan Gedung-gedung bertingkat.
2. Dibutuhkan planning yang matang, pada desain dan lainnya sehingga tidak menimbulkan permasalahan pada akhir program dibutuhkan ketelitian sehingga permasalahan sedini mungkin dapat diantisipasi.
3. Matang dalam perencanaan sehingga tidak menimbulkan permasalahan konsep drainase yang tepat sasaran.

4. Pelaksanaan program harus sesuai perencanaan (bestek).

“Untuk pembangunan drainase tahun ini memang kami coba mengawasi proses pengerjaan yang dilakukan oleh kontraktor..” (hasil wawancara dengan Kasubag Perencanaan Faharuddin, ST).

“Untuk kualitas saluran drainase memang harus disesuaikan dengan rancangan awal bangunannya, tidak boleh melenceng karena kalau tidak sesuai dengan besteknya pasti akan cepat rusak atau disengaja disempitkan oleh pihak kontraktor, kalau saya melihat drainase yang sudah ada masih kurang layak untuk menyalurkan air ke sungai atau tempat tujuannya, karena seringnya mengalami penyumbatan dan salurannya kecil” (hasil wawancara dengan Kabid Cipta Karya, Muhammad Ashar, ST, M.Eng).

Pemanfaatan program juga harus tepat sasaran. Sedapat mungkin limbah rumah tangga tidak boleh di buang pada saluran tersebut. Peruntukannya khusus sesuai fungsi bangunan.

4. KESIMPULAN

Faktor-faktor yang menghambat peran Dinas Pekerjaan Umum dalam percepatan pembangunan drainase di Kota Baubau yaitu (a)internal masih kurangnya sarana yang ada di dalam dinas pekerjaan umum, sumber daya manusia (pegawai) yang belum profesional dalam melaksanakan tugas terlihat masih adanya pegawai yang kadang terlambat masuk kantor maupun menyelesaikan tugasnya, sumber daya anggaran yang masih terbatas. (b)eksternal yaitu pihak pengguna harus mefungsikan sesuai peruntukannya agar dapat meminimalisir terjadinya penyumbatan, adanya kelengkapan administrasi pihak kontraktor dan koordinasi dinas pekerjaan umum dengan instansi lain yang belum maksimal.

5. SARAN

Agar faktor-faktor yang menghambat peran Dinas Pekerjaan Umum dalam percepatan pembangunan drainase di Kota Baubau dapat dihindari, maka perlu penambahan jumlah sarana yang ada di dalam dinas pekerjaan umum, sumber daya manusia (pegawai) yang harus profesional dalam melaksanakan tugas dengan mendisiplinkan diri dalam menyelesaikan tugasnya masing-masing, perlu penambahan anggaran pembangunan drainase. Diharapkan kesadaran pada semua pihak untuk memelihara dan menjaga keberlanjutan bangunan program tersebut sesuai faedahnya.

DAFTAR REFERENSI

- [1] H. Saidah *et al.*, *Drainase Perkotaan*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- [2] D. W. Wijaya, “Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Penentuan Kawasan Prioritas untuk Peningkatan Kualitas Infrastruktur pada Kawasan Pemukiman Kumuh di Kota Malang),” *J. Ilm. Adm. Publik*, vol. 2, no. 1, pp. 1–10, 2016.
- [3] A. Irmayana and S. Syamsuddin, “Smart Alert System Berbasis Android Untuk Pelayanan Publik Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar,” *Semnasteknomedia Online*, vol. 4, no. 1, pp. 4–7, 2016.
- [4] D. Mulyono, “Analisis Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kelurahan Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan,” *J. Mozaik*, vol. 9, no. 2, pp. 94–100, 2017.
- [5] E. Purba and S. Yunita, “Kesadaran Masyarakat dalam Melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup,” *JUPIIS J. Pendidik. Ilmu-Ilmu Sos.*, vol. 9, p. 57, Jun. 2017, doi: 10.24114/jupiis.v9i1.6461.
- [6] B. Santoso, K. Badarudin, and S. Annur, “Pelaksanaan Tata Kelola Administrasi Data Kesiswaan Di Madrasah Tsanawiyah Darul Jannah Muara Burnai II,” *Stud. Manag.*, vol. 3, no. 2, pp. 149–160, 2021.
- [7] T. Ogoney, “Peranan Camat Sebagai Koordinator dalam Menunjang Keberhasilan Pembangunan di Distrik Masyeta,” *J. Eksek.*, vol. 1, no. 1, 2017.
- [8] Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan kebijakan UGM, 2002.
- [9] L. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2010.
- [10] M. Nisa, “Implementasi Total Quality Management (TQM) pada Manajemen Perpustakaan di Perpustakaan Universitas PGRI Palembang.” Program Studi Ilmu Perpustakaan, 2019.